

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PAJAK
EKSPOR PADA PERUSAHAAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT**

(Studi Kasus Pada PT. EMKL Panjang Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

SITI NUR AZIZAH

NPM : 1621030487

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H.Khoirul Abror, M.H

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441H/2020M

ABSTRAK

Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah salah satu perusahaan di bidang logistik yang memiliki ijin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang besar dan berat menggunakan kapal laut, atau yang biasa disebut dengan cargo laut. Di perusahaan ini terdapat pembayaran pajak ekspor pada perusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Jasa ekspedisi laut menjadi salah satu alternatif yang paling digemari oleh banyak masyarakat Indonesia, baik perseorangan ataupun pebisnis perusahaan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran pajak bea keluar (ekspor) pada PT. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) yang berlokasi di Panjang Bandar Lampung, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pajak ekspor pada PT. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem atau cara pembayaran pajak ekspor di PT. EMKL Panjang Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *induktif* alasannya karena penelitian ini membutuhkan analisa yang sangat mendalam untuk menemukan hukum terkait pembayaran pajak, jenis penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di pelabuhan panjang dan didukung oleh *library research* (penelitian pustaka) Penelitian ini dilakukan secara observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung kepada 6 orang pegawai yang bekerja di PT. EMKL. Setelah itu peneliti mengolah data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dimana penulis akan menganalisis data secara bertahap dan berlapis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran pajak ekspor yang dilakukan di PT. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), ialah kekurangan dan kelebihan pembayaran pajak ekspor dalam perusahaan ini, jika kelebihan pembayaran pajak ekspor maka perusahaan akan mengembalikan uang dengan jangka waktu 15 hari sd 3 bulan, dan apabila kekurangan pembayaran pajak ekspor, maka perusahaan tetap membayarkan kekurangannya tersebut ke perusahaan pajak tanpa memakai jangka waktu. Menurut Pandangan Hukum Islam sistem pembayaran ini diperbolehkan atau sah dalam Agama Islam. tetapi sebaiknya agar tidak terjadi kesalahan sistem dari perhitungan pajak ekspor ini, sebaiknya tidak menghitung pajak ekspor dengan harga patokan agar PT. EMKL tidak merasa keberatan dengan sistem ini, karena dengan memakai harga patokan maka PT. EMKL ini tidak tahu bahwa pajak ekspor tersebut kelebihan pembayaran atau kekurangan bayar. Dan PT. EMKL merasa tidak adil dengan sistem pembayaran seperti ini. Dan PT. EMKL ini melakukan nya dengan tidak didasari suka sama suka.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NUR AZIZAH
NPM : 1621030487
Jurusan/prodi : MUAMALAH
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran pajak ekspor pada perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (studi kasus pada PT. EMKL Panjang Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2019

Penyusun,

**SITI NUR AZIZAH
NPM. 1621030487**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudari:

Nama Mahasiswa: Siti Nur Azizah

NPM : 1621030487

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

Pembayaran Pajak Ekspor Pada

Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal

Laut (Studi Kasus Pada PT. EMKL

Panjang Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khoirul Abror, M.H

NIP. 196704031987031003

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

NIP. 197304142000032002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pajak Ekspor Pada Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (Studi Kasus Pada PT. EMKL Panjang Bandar Lampung)”** disusun oleh, Siti Nur Azizah, NPM: 1621030487 Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal. Senin, 10 Februari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Khairul Hain, M.H.
NIP. 197909252009121002

MOTTO

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (At-Taubah (9):29)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), h.203

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji sykur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan berharga dengan bangga mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta (Kemas Muhammad. Akib(Alm) dan Suwarni) yang dengan sabar tulus, ikhlas dan yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada anaknya, yang selalu membiayai anaknya, yang selalu memberikan dorongan, memberikan semangat tiada hentinya dan yang selalu mendoakanku untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah SWT membalas kebaikan mu, Aamiin.
2. Kakakku: Arie Setiawan, Ridhuan Ramadhan, Firdaus Fajrin, Andri Gunawan, Hendra Irawan yang tercinta, atas kasih sayang dan pengertiannya.
3. Seorang motivator yang selama beberapa tahun ini menemaniku, terimakasih karena telah membantuku, memberikan semangat, nasehat dan do'a untukku. Semoga Allah SWT memberikan jalan yang terbaik dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikanmu. Aamiin
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lmpung.

RIWAYAT HIDUP

Mempunyai nama lengkap Siti Nur Azizah, anak ke enam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Kemas Muhamaad Akib (Alm) dan ibu Suwarni. Lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 30 April 1998. Mempunyai 5 saudara kandung dari 6 bersaudara yakni: Arie Setiawan, Ridhuan Ramadhan, Firdaus Fajrin, Andri Gunawan, Hendra Irawan.

Mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Panjang Bandar Lampung, pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanjung Karang, pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung, pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), mengambil Program Studi *Mu'amalah* (Hukum Ekonomi Syariah) pada fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pajak Ekspor Pada Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut”** (Studi Kasus PT. EMKL Panjang Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

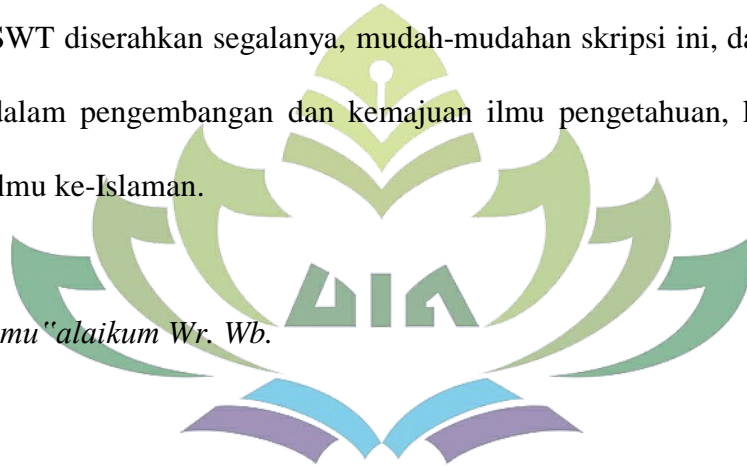
Skripsi Ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syariah. Atas Semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Bapak Dr. H. A Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H ., selaku Pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staff yang turut meberikan data berupa riteratur sebagai sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu, kakak, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, do'a dan menunjang pendidikan hingga berhasil.
8. Direktur PT. EMKL, Bapak William S. Sitompul, S.H, beserta staff yang telah memberikan izin, waktu, pengetahuan dan telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta, Nurul Idayati, Liani Putri, Tania Citradena, Indah Harum Rezeki, Dian edi putri. Terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, dan kelas F khususnya yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Dan Ibu Dosen serta Staff Karyawan Fakultas Syari'ah;
12. Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung tercinta. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun, diterima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT diserahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Bandar Lampung,

SITI NUR AZIZAH
NPM. 1621030487



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikasi Penelitian	7
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembayaran Pajak Ekspor dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Pajak dalam Islam	14
2. Sistem Pembayaran Pajak pada Zaman Rasulullah SAW.....	15
3. Kedudukan Pajak dalam Islam	18
4. Objek pajak	20
B. Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Pajak Ekspor	
1. Pengertian Pajak dalam Hukum Islam	24
2. Dasar Hukum Pajak dalam Islam	27
3. Sistem Bayar Pajak dalam Hukum Islam.....	29
C. Tinjauan Pustaka.....	53

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya PT.EMKL.....	55
2. Keadaan Sosial PT.EMKL	60
3. Struktur Organisasi PT.EMKL.....	63
4. Ciri-Ciri PT. EMKL	65

B. Sistem Pembayaran Pajak Ekspor Pada Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut	
1. Sistem Pembayaran Pajak Ekspor Pada PT.EMKL	68
2. Bentuk-Bentuk Pembayaran Pajak Ekspor Pada PT.EMKL.....	70
3. Kelebihan dan Kekurangan Bayar Pajak Ekspor Pada PT.EMKL.....	72

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sistem Pembayaran pajak ekspor pada PT.EMKL yang berlokasi di Panjang Bandar Lampung	77
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap sistem pembayaran pajak Ekspor pada PT.EMKL.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Bandar Lampung**
- Lampiran 2 Surat Bukti Wawancara di PT.EMKL**
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan**
- Lampiran 4 Dokumentasi di PT.EMKL**
- Lampiran 5 Blangko Bimbingan Skripsi**
- Lampiran 6 Daftar Gambar**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini. Sebab judul merupakan kerangka bertindak, apalagi dalam suatu penelitian. Hal ini menghindari penafsiran yang berbeda-beda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul; “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pajak Ekspor Pada Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Sebagai Berikut:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Hukum Islam adalah: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang Islam.²

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.³

¹ KBBI, *Kamus besar bahasa indonesia*, (Surabaya: amalia, 2005), h.336

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam, Cet Ketiga*, (Jakarta: Bumi Askara, 1999), h.

³ KBBI, *ibid*, h.329

Pembayaran pajak adalah salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban wajib pajak.⁴

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan sistem pembayaran kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir.⁵

Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah salah satu perusahaan di bidang logistik yang memiliki ijin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang basar dan berat menggunakan kapal laut, atau biasa disebut dengan cargo laut.⁶

Berdasarkan Penegasan yang disebutkan diatas maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah mengkaji sistem pembayaran pajak ekspor disorot dari kacamata hukum Islam yang ada pada perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) yang berlokasi di Panjang Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang memotivasi untuk memilih dan membahas judul proposal ini, yaitu :

1. Alasan Objektif

- a. Masalah pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah, jadi pajak adalah iuran yang harus wajib dibayar oleh rakyat atau wajib

⁴ Ahmad Yani, *Solusi Masalah Perpajakan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.10

⁵ Ahmad Yani, *ibid*, h.21

⁶ E.Kartini, *Hukum Maritim*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama,2015), h.41

pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum.⁷

- b. Ingin mengetahui bagaimana sistem pembayaran pajak ekspor pada Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).

2. Alasan Subjektif

- a. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pajak sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji pada jurusan muamalah.
- b. Terdapat banyak sarana-prasarana yang menjadi penunjang terlaksana penelitian ini, seperti menanyakan atau wawancara kepada perusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang ada dalam PT EMKL yaitu kurang lebih bayar pajak ekspor, dalam sistem pembayaran pajak barang yang akan diekspor.

Pajak ekspor adalah pajak yang dikenakan pemerintah pada kegiatan-kegiatan ekspor. Objek pajak ekspor adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak ekspor ini dibebankan kepada wajib pajak sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).⁸

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha dibidang jasa. Hal-hal yang seperti : Pajak Pertambahan

⁷ Andi, *perpajakan*, (yogyakarta: CV.Andi Ofset, 2011), h.1

⁸ Gustian Djuanda, *Pajak Pertambahan Nilai*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h.11

Nilai kurang bayar, Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar, ataupun nihil merupakan hasil yang biasa berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, dari ketiga variable tersebut Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar adalah yang paling berpengaruh pada khususnya pada penerimaan pajaknya, dikarenakan setiap wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan kompensasi ataupun restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya.

Undang-undang Perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai karena jumlah Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran. Pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan pada setiap masa pajak, tetapi yang dapat melakukan restitusi pada setiap masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Pajak yang tidak dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak atau masih dalam tahap belum berproduksi, selain itu Pengusaha Kena Pajak hanya dapat melakukan restitusi pada akhir tahun buku.⁹

Pemerintah tidak dapat semena-mena untuk dapat menarik pendapatan yang berasal dari pajak. Oleh karena itulah, penarikan pajak yang dilakukan

⁹ Gustian Djuanda, *Ibid*, h.14

oleh pemerintah harus berdasarkan pada azas keadilan serta hukum pajak yang diletakkan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang berbunyi: “segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.¹⁰ Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan Undang- undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan Keputusan Presiden atau berdasarkan Peraturan Pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah daripada Undang-undang. Lain halnya dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang pajak. Selain itu pula berbagai peraturan daerah, baik Peraturan Daerah Propinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur tentang pemberlakuan suatu jenis pajak daerah di suatu propinsi atau kabupaten/kota. akan tetapi dari banyaknya Undang-Undang pajak yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat Undang-Undang yang mendefinisikan pajak secara rinci. Hal ini tampaknya terkait dengan definisi pajak itu sendiri, yang apabila di definisikan maka akan terlihat jelas bahwa pajak itu merupakan salah satu alat kepentingan penguasa.¹¹

¹⁰ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, (Bandung :PT. Rafika Aditama, 1998), ed. Revisi, cet. ke 5, h. 7.

¹¹ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2007), ed. ke 1, h. 13

Berdasarkan Penjelasan Diatas, merasa tertarik untuk mengangkat sistem pembayaran pajak. Dengan demikian memberikan judul skripsi ini mengenai “tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pajak ekspor pada perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL)”

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan penelitian ini. maka memfokuskan untuk meneliti suatu sistem pembayaran pajak ekspor yang terjadi di PT. EMKL Panjang Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana sistem pembayaran pajak ekspor pada PT. EMKL yang berlokasi di Panjang Bandar Lampung ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran pajak ekspor pada PT. EMKL

F. Tujuan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :¹²

- a. Untuk mengetahui sistem pembayaran pajak ekspor di perusahaan EMKL.
- b. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan obyektif terhadap sistem pembayaran pajak ekspor di perusahaan EMKL khususnya dalam hukum Islam.
- c. Untuk menganalisis sistem pembayaran pajak ekspor di perusahaan EMKL

G. Signifikasi Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman, selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap pembaca mengenai sistem pembayaran pajak ekspor.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta : Rajawali Pers,2015),h.109

H. Metode penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana sesuatu penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian juga merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil data, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.¹³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian deskriptif analisis ini digunakan untuk mengungkapkan data

¹³*Ibid*, h.37-38

¹⁴Burhan Bungin, *metodologi penelitian kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 201

penelitian yang sebenarnya. Dalam kaitan ini, penelitian ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Pembayaran Pajak Ekpor Pada PT. EMKL Panjang Bandar Lampung.

2. Jenis dan Sumber Data

Data dari penelitian ini berasal dari beberapa sumber, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada, seperti buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan.¹⁵

¹⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo, 2014), h.81

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, maksudnya ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas; Objek atau Subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dalam memperoleh data tentang sistem pembayaran pajak ekspor yang berlokasi di Panjang Bandar Lampung. Adapun yang menjadi Subjek dari kegiatan tersebut ialah PT EMKL. Dalam sistem pembayaran pajak ekspor, ditemukan ada 6 orang pegawai dalam perusahaan diantaranya ialah: Direktur, Ppjk, Staf Keuangan, Operasional, Staf Dokumen 1, Dokumen 2. Yang memegang data perusahaan tersebut. Dan sampel di ambil dengan teknik total sampling yakni mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan bahan penelitian karena jumlahnya yang relatif sedikit.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 6 pegawai dalam perusahaan diantaranya ialah: Direktur, Ppjk, Operasional, Staf Keuangan, Staf Dokumen 1, Dokumen 2. yang berada di PT.EMKL Panjang Bandar Lampung. Jadi pengambilan sampel ini disebut juga Quota Sampling. Teknik Sampling mengambil jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Kelebihan metode ini yaitu praktis karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya, sedangkan

kekurangannya yaitu bisa penelitian cukup tinggi jika menggunakan metode ini.

Teknik pengambilan sampel dengan cara ini biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki jumlah terbatas. Seperti penelitian pada PT. EMKL ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan objek penelitian atau responden. Wawancara dilakukan dengan mengajukan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau perantara yang mengetahui persoalan dari objek penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan perusahaan Emkl Panjang Bandar Lampung. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*). Artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas.

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h.17

b. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. Pengamatan dilakukan dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti untuk mengumpulkan data.¹⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dalam penelitian ini, dokumentasi didapatkan dari sumber buku, website, dan lembaga yang terkait dengan data yang menunjang dalam penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

¹⁷Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat, CV.Jejak,2018), h.108

- c. Sistematisasi Data (*Sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah¹⁸

6. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pajak Eskpor di Panjang Bandar Lampung yang di dapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikanya kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Pajak pada PT. EMKL Panjang Kota Bandar Lampung.

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai bagi hasil yang sifatnya umum. Kemudian diolah untuk diambil data-data yang sifatnya khusus mengenai Sistem Pembayaran Pajak pada PT. EMKL Panjang Kota Bandar Lampung.¹⁹

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Fajar Interpretama Mandiri,2017), h.138

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016),h.109

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Pembayaran Pajak Ekspor dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pajak dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” atau suatu ketika bisa disebut Al-Kharaj, akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Perdebatan antara yang pro dan kontra terhadap sistem pajak sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena telah banyak tulisan baik berupa buku, naskah hasil penelitian, proceeding seminar dan diskusi, dan lain-lain dari berbagai ulama dan para pemikir Islam. Tulisan tersebut banyak memuat kutipan hadis hingga pendapat para ulama dari berbagai masa atau zaman dari yang paling ekstrim menentang hingga yang menghalalkan pemungutan pajak dengan kondisi dan syarat tertentu. Hanya saja memang, seperti diakui oleh DR. Umer Chapra, pendapat ulama atau pemikir Islam yang menentang dipungut-nya pajak lebih banyak dibandingkan yang sebaliknya. Oleh beliau pemikiran-pemikiran seperti ini dianggap sebagai pemikiran yang aneh untuk diterapkan pada zaman atau situasi seperti saat ini, istilah yang berbeda digunakan oleh beberapa ulama untuk pajak, diantaranya dhara’ib, wazha’if, kharaj, nawa’ib dan kilaf as-sulthaniyyah). Dasar diharamkannya pajak oleh sebagian ulama

didasarkan pemikiran bahwa pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya adalah kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai seorang muslim sebagaimana rukun Islam lainnya yang diwajibkan oleh Allah SWT, sedangkan konsep pajak dalam Islam menyatakan bahwa pajak hanya dapat dikenakan pada kelebihan harta bukan pada penghasilan. Negara tidak dapat mengenakan pajak langsung seperti pajak penjualan pada barang dan jasa juga pajak dalam bentuk biaya peradilan, biaya petisi, penjualan atau pendaftaran tanah, bangunan, atau jenis pajak lain selain yang syariah.

2. Sistem Pembayaran Pajak pada Zaman Rasulullah SAW

Sistem perpajakan dalam Islam sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Saat Rasulullah menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan perang (ghanimah), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (fai), zakat, pajak tanah (kharraj), dan pajak kepala (jizyah). Kecuali dua sumber pertama, yang lainnya merupakan sumber penghasilan tahunan.

Sedangkan pada masa sekarang, umumnya penerimaan negara hanya diperoleh dari pajak dan zakat. Namun, tidak semua negara di dunia memasukkan zakat dalam instrumen penerimaan di kas negara. Sementara itu, untuk sumber pendapatan berupa ghanimah dan fai tidak lagi diterapkan.

Penerimaan dari zakat ini hanya dibebankan kepada penduduk Muslim, selain merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Para penduduk dari kalangan Muslim pun juga dikenakan beban pajak. Sementara itu, terhadap penduduk non-Muslim, Rasulullah selaku kepala negara dan pemerintahan hanya menerapkan sistem pungutan pajak berupa jizyah dan kharraj.

Seiring dengan makin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, membuat jumlah muzakki (para pembayar zakat) mengalami peningkatan. Meski banyak orang yang ingin membayar zakat kepada Rasulullah SAW secara sukarela, namun ini bukanlah metode yang memadai untuk mengumpulkan zakat. Karena itu, sekitar tahun ke-9 Hijriyah, Rasulullah mengangkat sejumlah orang untuk menghimpun zakat dari berbagai suku.

Dalam Ensiklopedi Muhammad sebagai Negarawan disebutkan, para petugas (amil zakat) berkeliling negeri untuk mengumpulkan zakat dari masing-masing suku, lalu membawanya ke hadapan Rasulullah. Para amil zakat di zaman Rasulullah ini tidak hanya ditugasi untuk mengumpulkan zakat, tetapi juga mengumpulkan jizyah dan kharraj. Biasanya, pemimpin suku diangkat sebagai kolektor zakat (amil) untuk anggota sukunya. Tetapi, pengangkatan ini kebanyakan bersifat temporer.

Mekanisme penerapan dan pemberlakuan pajak yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ini, kemudian diteruskan di masa kepemimpinan Al-Khulafa ar-Rasyidun. Jika pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq, sistem pembayaran pajak belum dilakukan secara tersistematis, maka tidak demikian halnya di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Umar mulai mengatur dan menertibkan sistem pembayaran pajak, terutama kharraj.

Sistem pembayaran kharraj yang telah diterapkan oleh Umar ini di masa kepemimpinan Ustman bin Affan tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya adalah karena ia menerapkan perbedaan perlakuan terhadap tanah yang dimiliki oleh penduduk yang masih terhitung sanak keluarganya dan tanah yang dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Usman. Namun, pada masa Ustman inilah mulai dibentuk departemen jawatan pajak.

Baru setelah Ali bin Abi Thalib menduduki jabatan khalifah, para gubernur yang pernah diangkat oleh Usman dipecatnya. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan di masa pemerintahan Umar.

3. Kedudukan Pajak dalam Islam

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram.

Jika kita liat dari segi maslahat maka pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini diambil dengan asumsi bahwa pajak adalah ibadah tambahan setelah zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana amri tersebut disini ialah pemerintah.

Rasulullah SAW pernah menerangkan kepada para sahabatnya Radhiyallahu ‘anhum bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin: “Bolehkah melawan/memberontak?”. Lalu Rasulullah SAW menjawab ; “Tidak boleh! Selagi mereka masih menjalankan shalat” Selain itu juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 59 mengenai makna ketaatan pada ulil amri

إِطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa (4): 59)

Pada ayat tersebut bisa ditarik makna bahwa ketaatan tersebut juga memiliki batas yakni pada hal yang bersifat ma'ruf saja, bukan pada hal yang tidak ma'ruf. Hal lain yang menjadi pertimbangan saya akan pandangan ini ialah bahwa pajak tersebut alangkah baiknya dibayarkan sesuai dengan hukumnya dikarenakan pajak tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh Negara.

Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2008, pajak menyumbang hampir 70 % total dana dari APBN dimana seperti yang diketahui, ada banyak sektor-sektor yang masih membutuhkan dana dari APBN tersebut seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Di sektor-sektor itulah dana APBN akan disalurkan.

Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan jika kita lihat pada pajak penghasilan, zakat yang kita keluarkan akan mengurangi PKP kita, dan jika penghasilan kita dibawah PTKP maka kita tidak kena pajak, yang demikian termasuk dalam asas keadilan. Tanpa adanya pajak, maka pemerintahan pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu juga akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jikalau ada perilaku korupsi dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi yang melakukannya dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa di akhirat kelak.

4. Objek Pajak Ekspor

Pajak ekspor untuk JKP dikenakan pada beberapa objek, antara lain:

a. Jasa Maklon

Jasa Maklon merupakan jasa yang digunakan suatu badan usaha untuk menghasilkan barang yang dipesan secara khusus oleh klien atau pemesan. Kategori Jasa maklon yang masuk dalam kategori pajak ekspor JKP adalah:²⁰ Pemesan jasa berada diluar daerah pabean dan berstatus wajib pajak luar negeri. Pemesan jasa menyediakan spesifikasi barang yang dipesan. Bahan merupakan bahan mentah, bahan setengah jadi atau bahan pelengkap yang kemudian diproses menjadi BKP. Kepemilikan barang yang dihasilkan oleh jasa maklon adalah pada pemesan JKP. Barang pesanan dikirim ke pemesan yang berada diluar daerah pabean. Untuk jasa maklon, pemerintah memberikan pengecualian pada ekspor barang. Artinya, barang yang dihasilkan dari jasa maklon untuk diekspor tidak dicatatkan sebagai ekspor BKP pada SPT Masa PPN. Pajak ekspor untuk sektor jasa perawatan dan perbaikan, mencakup: Jasa barang bergerak yang digunakan diluar daerah paben. Jasa barang tidak bergerak yang digunakan diluar daerah pabean.

b. Pajak ekspor untuk jasa konstruksi

Jasa konstruksi yang dimaksud adalah jasa konsultasi perencanaan konstruksi, jasa pengerjaan konstruksi serta jasa pengawasan pekerjaan konstruksi. Batasan untuk jasa konstruksi ini meliputi:

²⁰ Nufansa Wira Sakti, *Buku Pajak E-Commerce*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013), h.45

1. Jasa barang bergerak yang digunakan diluar pabean.
2. Jasa untuk barang tidak bergerak yang digunakan diluar pabean.

Pengusaha yang menjalankan ekspor JKP harus melaporkan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak. Pemberitahuan ini dibarengi dengan invoice dan Faktur Pajak.

c. Pajak Ekspor untuk Barang

Untuk barang, pemerintah sejatinya membebaskan pengusaha yang berorientasi ekspor dari pungutan bea. Bahkan, pemerintah memberikan insentif dalam bentuk pengembalian pajak atau restitusi pajak terhadap barang yang dieskpor.²¹

Namun, ada beberapa komoditas atau barang yang tetap dibebankan pajak ekspor. Nah, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) mewajibkan pajak ekspor harus dilunasi barang masuk ke angkutan.

Pajak ekspor untuk barang ini ditetapkan berdasarkan Harga Patokan Ekspor (HPE), yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). HPE ini tidak ditetapkan sembarangan sebab penetapannya berdasarkan harga rata-rata internasional atau bisa juga menggunakan harga rata-rata Free On Board (FOB).

Barang yang Terkena Pajak Ekspor Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah memberikan insentif untuk pengusaha yang

²¹ Ali Purwito, Indrian, *Ekspor Impor*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), h.209

berorientasi ekspor. Namun, ada beberapa barang atau komoditas yang tetap dikenakan pajak ekspor.

Alasan pemerintah tetap membebankan pajak ekspor untuk beberapa komoditas adalah:

Menjaga persediaan bahan baku serta menjamin ketersediaan kebutuhan didalam negeri. Melindungi kelestarian alam. Menjaga stabilitas barang didalam negeri. Meningkatkan daya saing ekspor produk tertentu. Selain itu, pemerintah juga ingin agar produk barang yang diekspor merupakan barang setengah jadi, dalam arti sudah diolah dan memiliki nilai tambah. Barang atau komoditas yang dikenai pajak ekspor menurut DJPEN antara lain:

- 1) Rotan, dengan besaran pajak ekspor 15% yang terdiri dari: Rotan asalan yang telah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi. Rotan yang telah dipoles halus. Hati rotan. Kulit rotan.

Perhitungan pungutan ekspor (PE)

Perhitungan pungutan ekspor didasarkan pada harga patokan ekspor (HPE) yang diterapkan setiap bulan oleh menteri perdagangan berdasarkan harga rata-rata internasional.

Pungutan ekspor (PE) dihitung berdasarkan rumus : Tarif pajak ekspor (PE) x Harga patokan ekspor (HPE) x jumlah satuan barang x nilai kurs.

Contoh : $15 \% \times 1 \times \text{USD } 750/\text{MT} \times 103.070 = 11.595$

- 2) Kayu, dengan besaran pajak ekspor 15% yang terdiri dari: Veneer. Kayu serpih. Produk Kayu olahan.

- 3) Produk Pasir, dengan besaran pajak ekspor 15% Pasir kwarsa dan silika. Pasir alam.
- 4) Kelapa sawit, crude palm oil (CPO) dan produk turunan, dengan besaran pajak 3% Kelapa sawit, tandan buah segar, inti/biji kelapa sawit. CPO, dengan besaran pajak 1%. Demikianlah pajak ekspor yang diperuntukkan untuk ekspor barang. Keempat produk yang telah disebutkan ini memang diatur pemerintah agar kelangsungan bahan baku tetap terjaga dan barang yang diekspor memiliki nilai tambah.²²

Alasan pemerintah memberikan pajak kepada barang-barang tersebut adalah untuk menjaga ketersediaan di dalam negeri juga menjaga persediaan bahan baku. Jika tidak dikenakan pajak, dikhawatirkan menjadi tidak terkontrol dan tidak memiliki stok di dalam negeri.

Untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan daya saing untuk produk tertentu. Pemerintah juga menginginkan barang yang di ekspor adalah barang setengah jadi sehingga memiliki nilai lebih nantinya.

Itulah penjelasan terkait ketentuan dalam pajak di Indonesia yang harus kamu ketahui. Jika kamu berencana terjun dalam usaha ekspor

²² Klasifikasi dan objek pajak ekspor. “(on-line), tersedia di: <http://www.online-pajak.com> (2 oktober 2018).

A. Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Pajak Ekspor

1. Pengertian pajak dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama (*Al-Ushr*) atau (*Al-Maks*), atau bisa juga disebut (*Adl-Daribah*), yang artinya adalah :”Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut (*Al-Kharaj*), akan tetapi *Al-Kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah: “Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-D}aribah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, ringkasannya sebagai berikut:²³

a. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi

²³ Gusfahmi, *pajak menurut syariah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2007), h.30

sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

b. Gazi Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Definisi yang diberikan oleh qardhawi dan Inayah, masih terkesan sekular, karena belum ada unsur-unsur syari'ah. Dua definisi tersebut hampir sama dengan definisi pajak menurut tokoh-tokoh pajak non-Islam.²⁴

Lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Zallum, karena dalam definisinya, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu :

1) Diwajibkan oleh Allah Swt.

²⁴ Gusfahmi, *ibid*, h.33

- 2) Objeknya adalah harta (*al-Mal*).
- 3) Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non muslim
- 4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
- 5) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatas oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi 4 unsur :

- a) Harus adanya nash (Alquran dan Al-Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non Muslim.
- c) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.

Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Dengan definisi di atas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *d}aribah* bukan zakat), karena kekosongan atau kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan

mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu dilakukan.²⁵

Dari definisi diatas juga terlihat perbedaan antara pajak (*d}aribah*) dengan *kharaj* dan *jizyah*, yang sering kali dalam berbagi literatur disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya, ketiganya berbeda. Objek pajak(*dharibah*) adalah *al-Mal* (harta), objek *jizyah* adalah jiwa (*an-nafs*), dan objek *kharaj* adalah tanah (status tanahnya). Namun jika dilihat dari sisi objeknnya, objek pajak (*d}aribah*) adalah harta, sama dengan objek zakat.

2. Dasar Hukum Pajak dalam Islam

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri.

a. Dalil Hukum Pajak dalam Al-quran terdapat pada ayat-ayat berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa> (4) : 29).²⁶

²⁵ Usman Yatim, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta : PT. Bina rena pariwisata: 2011),h.131

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), h.83

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

- b. Dalil ini bahwasannya Allah telah menjanjikan bagi penduduk negeri yang mau beriman dan bertaqwa (yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi laranganNya), mereka akan dijamin oleh Allah mendapatkan kebaikan hidup mereka di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, sebagaimana Allah SWT. berfirman :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

“Seandainya penduduk suatu negeri mau beriman dan beramal shalih, niscaya Kami limpahkan kepada mereka berkah (kebaikan yang melimpah) baik dari langit atau dari bumi, tetapi mereka mendustakan (tidak mau beriman dan beramal shalih), maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.(QS. Al- A’ra>f (7): 96).²⁷

Ketergantungan kita kepada diterapkannya pajak, merupakan salah satu akibat dari pelanggaran ayat di atas, sehingga kita disiksa dengan pajak itu sendiri. Salah satu bukti kita melanggar ayat di atas adalah betapa banyak di kalangan kita yang tidak membayar zakatnya terutama zakat mal. Ini adalah sebuah pelanggaran. Belum terhitung pelanggaran-pelanggaran lain, baik yang nampak atau yang samara.

Kalau manusia mau beriman dan beramal shalih dengan menjalankan semua perintah (di antaranya membayar zakat sebagaimana mestinya) dan menjauhi segala laranganNya (di antaranya menanggalkan

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.163

beban pajak atas kaum muslimin), niscaya Allah akan berikan janji-Nya yaitu keberkahan yang turun dari langit dan dari bumi.

Bukankah kita menyaksikan beberapa negeri yang kondisi alamnya kering lagi tandus, tetapi tatkala mereka mengindahkan sebagian besar perintah Allah, maka mereka mendapatkan apa yang dijanjikan Allah berupa berkah/kebaikan yang melimpah dari langit dan bumi, mereka dapat merasakan semua kenikmatan dunia. Sebaliknya, betapa banyak negeri yang kondisi alamnya sangat strategis untuk bercocok tanam dan sangat subur, tetapi tatkala penduduknya ingkar kepada Allah dan tidak mengindahkan sebagian besar perintah-Nya, maka Allah hukum mereka dengan ketiadaan berkah dari langit dan bumi mereka, kita melihat hujan sering turun, tanah mereka subur nan hijau, tetapi mereka tidak pernah merasakan berkah yang mereka harapkan.

3. Sistem Bayar Pajak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam sistem pembayaran pajak yaitu:

a. *Jizyah*

Jizyah atau *jizya* (Arab: جُزْيَة; Bahasa Turki Utsmaniyah: *cizye*) adalah pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-Muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Sebagai imbalannya, pihak non-Muslim yang membayar *Jizyah* kepada negara dibiarkan untuk mempraktikkan ibadah mereka, untuk menikmati sejumlah kebebasan komunal tertentu, berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan negara atas agresi dari luar, juga pembebasan dari wajib militer (Jihad) dan Zakat yang dikenakan

hanya kepada umat muslim. Istilah Arab *jizyah* ada pada Al-Qur'an Surah At-Taubah: 29, tetapi Al-Qur'an tidak menspesifisikan *jizyah* sebagai pajak per kepala²⁸

Jizyah dikritik karena dikhususkan pada non-Muslim, meski sebenarnya bagi umat muslim sendiripun diwajibkan untuk membayar Zakat, baik zakat tahunan maupun zakat harta, yang diberikan untuk kalangan yang berhak dan membutuhkan.

pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non muslim yang hidup di negara/pemerintahan Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintahan Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Dalam menghadapi negara non Islam terdapat tiga pilihan yang ditawarkan Islam : masuk Islam, membayar *jizyah* atau diperangi. Bagi yang masuk Islam mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar *jizyah*. Bagi yang tidak mau masuk Islam ada dua pilihan yaitu membayar *jizyah* atau diperangi.

b. Kharaj

Pajak bumi ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam, *Kharaj* adalah cukai hasil tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Dalam undang-undang syariah,

²⁸ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 70

Kharaj adalah cukai untuk tanah pertanian. *Kharaj* tidak disebut dalam Quran atau Hadits tetapi lebih ke *ijma'* atau konsensus ulama Islam dan bagian dari tradisi Islam atau *urf*.

Dalam sejarah Islam, *Kharaj* berupa bea yang dikenakan atas tanah yang telah dirampas dari Kekaisaran Bizantium dan Sassanid, baik melalui perang atau damai. Jika perjanjian damai antara kaum Muslim dan penduduk ini sepakat mengatakan tanah tersebut adalah milik Daulah Islamiyah (negara), dan mereka mengakuinya dengan membayar *Kharaj*, maka mereka harus menunaikannya. *Kharaj* menurut bahasa berarti al-kara '(sewa) dan *al-ghullah* (hasil). Setiap tanah yang diambil dari kaum *kuffar* dengan cara paksa, setelah diumumkan perang terhadap mereka, maka tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah *kharajiyah*. Meskipun mereka masuk Islam setelah penaklukan itu, namun tanah tersebut statusnya masih tanah *kharajiyah*.

c. 'Usyur

pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak Impor dan Ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata, Islam membenarkan pemungutan pajak.

Para ulama sejak zaman sahabat, seperti Ibnu Umar, Atha', Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab dan lainnya, demikian pula ulama-ulama mazhab, memberitakan bahwa di samping zakat masih ada

lagi kewajiban muslim terhadap hartanya yang perlu dikeluarkan seperti: Infaq, Shadaqah ataupun pajak.²⁹

Dalam hal ini Imam Asy-Syathiby menyatakan secara tegas "Bila kas negara telah kosong, kebutuhan rakyat dan kemaslahatan umum tidak terpenuhi, roda pemerintahan tidak akan lancar karena kurangnya devisa/pendapatan maka pemerintah yang adil dapat memungut pajak pada orang-orang yang mampu selain zakat."

Pajak hukumnya mubah atau boleh (dapat dibenarkan oleh Islam), sebab kita sepakat bahwa tidak diragukan lagi adanya manfaat besar yang dapat diraih lewat pajak tersebut.

Pemungutan pajak diperbolehkan dalam Islam seperti yang dikatakan oleh Monzer Kahf (seorang ahli ekonomi muslim), harus terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal penting diantaranya bahwa:

- 1) Pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuan baik kekayaan maupun sumber penghasilan Wajib Pajak.
- 2) Orang yang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak.
- 3) Pajak dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat.
- 4) Alokasi penerimaan pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syari'ah.

Hukum Islam sebagai hukum agama yang paling dominan di Indonesia, memiliki kedudukan yang strategis sebagai bahan bagi pembentukan hukum nasional karena secara teoretis hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat mempunyai nilai dan peluang yang sama untuk dijadikan

²⁹Instrumen pajak dalam ekonomi islam.”(on-line), tersedia di: [https:// rozalinda. wordpress. com](https://rozalinda.wordpress.com) (21 mei 2010).

sebagai sumber dalam implementasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, integrasi hukum di Indonesia seringkali dilakukan. Misalnya ketika membicarakan hukum perkawinan di Indonesia, maka akan dijumpai Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu produk integrasi hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

Usaha serupa juga dilakukan pemerintah terhadap hukum zakat yang dikompilasikan dengan hukum pajak. Pada 20 Agustus 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Pemerintah inilah sebenarnya yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf g.

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2009. Usaha integrasi antara zakat dan pajak tersebut tidak berhenti hanya pada level legal formal, namun juga berkembang sebagai wacana yang dikembangkan oleh Masdar Farid Mas'udi dengan jargonnya Pajak itu Zakat. Akan tetapi Masdar melihat integrasi zakat dan pajak pada level filosofisnya.³⁰

Mengapa harus ada integrasi antara zakat dan pajak? Karena zakat merupakan ibadah yang ketentuannya ada dalam *nash*, tetapi masalah pengurusannya diserahkan kepada penguasa atau *ulûl amri*. Artinya, zakat secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Begitu juga salah satu tujuan pokok dari zakat adalah upaya mewujudkan keadilan sosial (*social*

³⁰ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 16.

justice), sama tujuannya dengan pembentukan sebuah pemerintahan. Sebab, sejarah telah menunjukkan, bahwa zakat bersama pajak (*jizyah* dan *kharaj*) telah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat dan sekaligus menjadi sumber keuangan yang amat potensial bagi negara dan pemerintah (*baitul mâl* atau *state institution*) sebagai mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, *political elite*, menempati posisi penting dalam rangka merealisasikan misi dan tujuan ajaran zakat.³¹

Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional. Seperti di Indonesia, pengaturan kelembagaan zakat meliputi bentuk dan administrasi negara, manajemen dan sanksi bagi lembaga yang lalai. Karena itu, pemerintah berkesimpulan bahwa manajemen yang kuat dan terlembaga diperlukan untuk memungkinkan zakat berkembang, tidak saja dalam konteks pemenuhan kewajiban keagamaan seorang muzaki, melainkan juga dalam kerangka strategi struktural untuk meningkatkan harkat hidup orang-orang yang lemah ekonominya.

Zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik

³¹ Masnun Tahir, "Integrasi zakat dan pajak di indonesia dalam tinjauan hukum Positif dan hukum Islam". *jurnal Al- 'Adalah*, Vol.10 No.1 (3 juni 2015), h.508

yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), Penerima harta zakat (mustahik), maupun bagi masyarakat keseluruhan. Menurut Yûsuf al-Qaradhawi, secara umum terdapat dua tujuan dan ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.

d. Zakat dan Pajak dalam Hukum Islam

Secara *harfiah*, zakat berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Adapun menurut pengertian *syara'*, zakat berarti mengeluarkan kadar tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sedangkan pajak menurut istilah adalah "pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak".

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah "Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum". Zakat merupakan pilar utama dalam sistem keuangan Islam sekaligus sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam. Zakat merupakan rukun Islam dan salah satu bentuk kewajiban bagi seorang Muslim untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau hartanya yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di gariskan.

Zakat merupakan suatu lembaga yang unik yang tidak sama dengan pajak-pajak yang di tetapkan oleh suatu Negara. Hal ini dikarenakan zakat merupakan suatu pajak atas kekayaan dan bukan atas pemasukan, dikumpulkan dari orang kaya dan digunakan untuk orang miskin, asuransi sosial yang komprehensif, dibagikan pertama kepada lingkungan terdekat,

dengan peraturan yang ditentukan oleh Rasulullah, hukum dan sistem operasionalnya sederhana.

Abu Bakar Ash-Shidiq ketika memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat beliau berkata, "Demi Allah! Seandainya mereka tidak mau membayar seekor anak kambing betina yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah. Sungguh, aku akan memerangi mereka karenanya."

Zakat dalam ajaran Islam terbagi dalam dua kategori, yaitu Zakat Fitrah (jiwa) yang dibayarkan pada malam hari raya Idul Fitri dan Zakat Mal (harta) yang dibayarkan setiap waktu dalam satu tahun. Kedua jenis zakat ini memiliki fungsi teologis. Zakat fitrah berfungsi menyempurnakan puasa dibulan Ramadhan. Sedangkan Zakat Mal berfungsi menyucikan harta jiwa selama setahun. Selain fungsi teologis, Zakat mempunyai fungsi pragmatis, yaitu sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat serta pencapaian keadilan sosial.

Pengenaan pajak dilakukan dari sisa nafkah (setelah di kurangi kebutuhan hidup). Jumlah pajak yang dipungut secara makro harus ekuivalen dengan jumlah kebutuhan Baitul Mal yang digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Baitul Mal, sehingga pajak tidak boleh dipungut melebihi kebutuhan sebagaimana mestinya. Kemudian jika kebutuhan Baitul Mal telah terpenuhi dan Baitul Mal sudah mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan rutin, maka pungutan pajak harus dihentikan.

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah di haramkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At-Taubah (9): 29).³²

Berikut adalah perbedaan zakat dengan pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Zakat

- a. Zakat ditetapkan oleh Al-Qur'an sedangkan pajak kewajibannya berdasarkan Undang-undang.
- b. Zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila dilanggar mendapat dosa dan mendapat hukuman di akhirat, sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara apabila dilanggar mendapatkan hukuman di dunia.
- c. Zakat diwajibkan kepada umat muslim yang kaya, sedangkan pajak diwajibkan untuk semua rakyat muslim maupun non muslim.
- d. Kadar kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis nabi SAW; sedangkan kadar kewajiban pajak ditetapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhan.
- e. Zakat hanya diserahkan kepada *asnaf* yang selapan seperti yang ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an; pajak diserahkan Allah SWT

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), h.203

dalam bentuk pembangunan berbagai sarana untuk kemaslahatan bersama.

f. Zakat tidak mungkin dihapuskan meskipun para mustahiknya tidak ada lagi yang membutuhkan, sedangkan pajak mungkin saja dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara.³³

g. kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu kedudukannya sebagai ibadah yang memerlukan niat dalam pelaksanaannya. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Oleh karena itu kedudukannya adalah sebagai kedudukan sosial yang tidak memerlukan niat.³⁴

h. Diwajibkan kepada seluruh umat islam saja disuatu negara

i. Kewajiban agama bagi umat islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apapun.

j. Sumber dana besar zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan sunnah dan tidak boleh diubah oleh seseorang maupun pemerintah Butir-butir pengeluaran dan orang-orang yang berhak menerima harta zakat juga dinyatakan oleh Al-Qur'an dan sunnah zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima kepada golongan yang di tentukan Al-Qur'an Hadits Zakat dikenakan bukan terhadap

³³ Khoirul Abror, Fiqh Ibadah (Yogyakarta: Ladang Kata, 2018), h.174-175

³⁴ Khoirul Abror, Fiqh Zakat dan Wakaf, (Bandar Lampung: Permata, 2018), h.10

uang saja tetapi juga terhadap barang-barang komersil, hasil pertanian, barang tambang, dan ornamen.³⁵

2. Pajak

- a. Merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan pemerintah
- b. Dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan agama maupun ras
- c. Dapat ditanggihkan oleh pemerintah yang berkuasa
- d. Besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintah suatu negara.
- e. Pembelanjaan pajak biasanya dapat diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah
- f. Pajak biasa memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus orang miskin pajak dikenakan terhadap uang.³⁶

3. Jenis Pajak dibagi menjadi 2 :

- a. Pajak yang diambil secara 'adil dan memenuhi berbagai syaratnya.
Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas.
- b. Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya

³⁵ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: PT. fajar Interpratama, 2018), h.73

³⁶ *Ibid*, h.74

menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “*tafwit adna > al-mashlahatain tahshilan li a’la > huma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashalat yang lebih besar) dan “*yatahammalu ad}-d}arar al-kha > s li daf’i d}ararin ‘a > m*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).³⁷

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat.

Allah ta’ala berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ١٥

”Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.” (QS. Al-Hujura>t (49): 15)³⁸

Allah SWT berfirman yang berbunyi :

³⁷ Pajak dalam Islam.”(on-line) tersedia di: <https://muslim.or.id> (5 juni 2011)

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), h.517

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

”Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(QS. At-Taubah (9): 41)³⁹

Dengan demikian, salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan berapa besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pengarang Ghiyats al-Umam dan juga pendapat An Nawawi dan ulama Syafi’iyah yang lain, dimana mereka merajihkan pendapat bahwa kalangan kaya dari kaum muslimin berkewajiban membantu kaum muslimin dengan harta selain zakat.

Termasuk dari apa yang kami sebutkan, (pungutan dari) berbagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat, yaitu (yang memberikan) manfaat kepada seluruh masyarakat dan perlindungan mereka dari segi keamanan (militer) dan ekonomi yang tentunya membutuhkan biaya (harta) untuk merealisasikannya sementara hasil dari zakat tidak mencukupi. Bahkan, apabila dakwah kepada Allah dan penyampaian risalah-Nya membutuhkan dana, (maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk memenuhi keperluan itu), karena merealisasikan hal tersebut merupakan kewajiban bagi tokoh kaum muslimin dan biasanya seluruh hal itu tidak dapat terpenuhi dengan

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), h.194

hanya mengandalkan zakat. Kewajiban tersebut hanya bisa terealisasi dengan penetapan pajak di luar kewajiban zakat. Oleh karena itu, kewajiban ini ditopang kaidah “*ma> la> yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib*“, sesuatu dimana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali denganya, maka sesuatu itu bersifat wajib. Kemudian, setiap individu yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah Islam untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan individu, maka sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip “*al-ghurm bi al-ghurm*”, tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil. Namun, ketetapan ini terikat dengan sejumlah syarat, yaitu :

Bait al-ma>l mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk menarik pajak memang sangat dibutuhkan sementara sumber pemasukan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada. Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat dengan cara yang adil.

Bermusyawarah dengan *ahlu ar-ra'yi* dan anggota syura dalam menentukan berbagai kebutuhan negara yang membutuhkan dana tunai dan batas maksimal sumber keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syari'at.

Pajak jenis ini, yang dibagikan secara adil dan dengan cara yang benar telah disebutkan oleh para ahli fikih empat madzhab dengan

penamaan yang berbeda-beda sebagaimana hal ini didukung oleh perbuatan ‘Umar in al-Khathab di masa kekhalifahannya, dimana beliau mewajibkan pajak sebesar 10% kepada para pedagang ahlu al-harb, sedangkan untuk pedagang *ahlu az>-z>immah* sebesar 5%, dan 2,5% bagi pedagang kaum muslimin.⁴⁰ Sedangkan pajak jenis kedua yang diambil secara tidak wajar dan zhalim, maka hal itu tidak lain merupakan bentuk penyitaan sejumlah harta yang diambil dari pemiliknya secara paksa tanpa ada kerelaan darinya. Hal ini menyelisihi prinsip umum syari’at Islam yang terkait dengan harta, yaitu hukum asal dalam permasalahan harta adalah haram diganggu karena berpedoman pada dalil-dalil yang banyak, diantaranya adalah Sabda Nabi SAW. Berdasarkan hal ini, maka berbagai hadits, baik yang shahih maupun yang tidak, yang mencela para pemungut pajak dan mengaitkannya dengan siksa yang berat, kesemuanya dibawa kepada makna pajak yang diberlakukan secara tidak wajar dan zhalim, yang diambil dan dialokasikan tanpa hak dan tanpa adanya pengarahannya. Hal ini berarti pegawai yang dipekerjakan untuk memungut pajak dipergunakan oleh para raja dan penguasa serta pengikutnya untuk memenuhi kepentingan dan syahwat mereka dengan mengorbankan kaum fakir dan rakyat yang tertindas.⁴¹ Inilah kondisi riil yang tersebar luas di pelosok dunia ketika Islam telah berkembang. Berbagai pajak yang tidak wajar diwajibkan oleh beberapa pemerintahan pada saat ini di tengah-tengah manusia dan atas kaum fakir, khususnya kaum muslimin.

⁴⁰ Iqbal Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), h. 17

⁴¹ Khazanah, *Buku pintar Islam*, (Jakarta: PT. Kencana, 2010), h.22

Kemudian, pajak tersebut disetorkan kepada para pemimpin, penguasa dan kalangan elit, yang pada umumnya digunakan untuk memenuhi syahwat dan kesenangan mereka dan hal itu tertuang dalam berbagai protokol resmi kenegaraan ketika menerima tamu dari kalangan para raja dan pemimpin. Demikian pula pajak tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai pesta dan festival yang didalamnya terdapat kemaksiatan dan minuman keras, mempertontonkan aurat, pertunjukan musik dan tari serta kegiatan batil lainnya yang jelas-jelas membutuhkan biaya yang mahal. Maka, pajak jenis ini seperti yang dinyatakan oleh sebagian ulama bahwa pajak tersebut justru dipungut dari kalangan miskin dan dikembalikan kepada kalangan elit.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seorang muslim yang peduli akan agamanya berkewajiban menjauhi segala bentuk keharaman dan kemaksiatan serta menjauhkan diri dari setiap pekerjaan yang justru akan memperbanyak dosa dan mengotori harta yang dimilikinya. Sebagaimana dia berkewajiban untuk tidak menjadi alat dan perantara untuk memaksa dalam tindak kezhaliman yang digunakan oleh para pelakunya dalam membebani manusia dengan berbagai pungutan harta. Bahkan, bisa jadi dia termasuk pelaku kezhaliman itu sendiri, karena biasanya seorang yang berserikat dengan para pelaku kezhaliman dan berbagi harta yang haram dengan mereka, (maka hal itu juga merupakan tindak kezhaliman), karena syari'at apabila mengharamkan suatu aktivitas, maka uang yang diperoleh dari aktivitas tersebut juga haram.

Adapun penetapan pajak di samping zakat, apabila tidak ditemukan sumber keuangan untuk memenuhi suatu kebutuhan negara kecuali dengan adanya penetapan pajak, maka boleh memungut pajak bahkan hal itu menjadi wajib. Inilah yang nampak bagiku dalam permasalahan ini. Apabila benar, maka hal itu berasal dari Allah dan jika keliru, maka hal itu berasal dari diriku. Saya memohon kepada Allah untuk meneguhkan langkah kita, menjauhkan kita dari kesesatan, memberi taufik kepada kita untuk mengerjakan amalan yang mengandung kebaikan di dunia dan akhirat, serta menjadikan diri kita sebagai sarana dalam memperbaiki manusia dan negara. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha menguasai dan Maha berupaya atas hal itu.

4. Karakteristik Pajak (*Djaribah*) Menurut Syariat

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*djaribah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu: ⁴²

- a. Pajak (*djaribah*) bersifat temporer, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
- b. Pajak (*djaribah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

⁴² Yahya Abdurahman, <http://HaytulIslam.net>, diakses 27 Mei 2012.

- c. Pajak (*d}aribah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab pajak (*d}aribah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d. Pajak (*d}aribah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan kelayakan masyarakat sekitar.
- e. Pajak (*d}aribah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*d}aribah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Pajak (*D}aribah*) merupakan suatu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, yang berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif) seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu tentu diperlukan tentara, polisi ataupun pegawai serta

perelngkapannya, tenaga kesehatan dan rumah sakit, para guru dan gedung sekolah.⁴³

5. Macam-Macam Pajak Dalam Islam

- a. *Al-Jizyah*: Upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam.
- b. *Al-Kharaj*: Pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam.
- c. *Al-Usyur*: Bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk kenegara Islam.

6. Kedudukan Pajak Dalam Islam

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram.

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah SAW. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat.

Dalilnya yang berbunyi:

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002),h. 2

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ ۖ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّيِّئِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah (2): 177)⁴⁴

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-An‘am (6): 141)⁴⁵

Abdur Razaq dalam Mushannaf Abd ar-Razaq meriwayatkan dari

Abdullah ibn Umar ra. yang menuturkan, ayahnya yakni Umar bin

Khathab. memungut pajak dari Nabth (gandum dan minyak zaitun),

jumhur ulama Madzhab Hanbali, seperti Ibnu Taimiyah, membolehkan

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), h.27

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), h.146

pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan *al-kalf as-sulthaniyah*. Juhur ulama Madzhab Hanbali menilai pajak yang diambil dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*d}aribah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtub, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat. Karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi 4 kriteria :

- 1) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- 2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- 3) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara

4) Jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Allah SWT berfirman dalam surah nya yang berbunyi:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ٥

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yakni yang menciptakan semua makhluk. (QS. Al-Alaq (96): 1-5)⁴⁶

Surah ini adalah surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW turun pada awal-awal kenabian ketika Beliau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Lalu Jibril datang kepada Beliau membawa wahyu dan menyuruh Beliau membaca, ia berkata, “Bacalah”. Dengan terperanjat Muhammad SAW menjawab, “Saya tidak dapat membaca.” Beliau lalu direngkuh oleh Malaikat Jibril hingga merasakan kepayahan, lalu dilepaskan sambil disuruh membacanya sekali lagi, “Bacalah.” Tetapi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam masih tetap menjawab, “Aku tidak dapat membaca.” Begitulah keadaan berulang sampai tiga kali, dan pada ketiga kalinya Jibril berkata kepadanya, “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah Yang mengajar

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), h.597

(manusia) dengan perantaraan kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yakni yang menciptakan semua makhluk.

Pada ayat selanjutnya disebutkan secara khusus manusia di antara sekian ciptaan-Nya. Oleh karena itu, yang telah menciptakan manusia dan memperhatikannya dengan mengurusnya, tentu akan mengaturnya dengan perintah dan larangan, yaitu dengan diutus-Nya rasul dan diturunkan-Nya kitab. Yakni banyak dan luas sifat-Nya, banyak kemuliaan dan ihsan-Nya, luas kepemurahan-Nya, dimana di antara kemurahan-Nya adalah mengajarkan berbagai ilmu kepada manusia. Maksudnya, Allah mengajar manusia dengan perantara tulisan baca. Hal itu, karena manusia dikeluarkan-Nya dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa, lalu Dia menjadikan untuknya pendengaran, penglihatan dan hati serta memudahkan sebab-sebab ilmu kepadanya. Dia mengajarkan kepadanya Al-Qur'an, mengajarkan kepadanya hikmah dan mengajarkan kepadanya dengan perantara pena, dimana dengannya terjaga ilmu-ilmu. Maka segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan nikmat-nikmat itu yang tidak dapat mereka balas karena banyaknya. Selanjutnya Allah SWT mengaruniakan kepada mereka kekayaan dan kelapangan rezeki, akan tetapi manusia karena kebodohan dan kezalimannya ketika merasa dirinya telah cukup, Ia malah bertindak melampaui batas dan berbuat zalim serta bersikap sombong terhadap kebenaran seperti yang diterangkan dalam ayat selanjutnya. Ia lupa, bahwa tempat kembalinya adalah kepada

Tuhannya, dan tidak takut kepada pembalasan yang akan diberikan kepadanya, bahkan keadaannya sampai meninggalkan petunjuk dengan keinginan sendiri dan mengajak manusia untuk meninggalkannya, dan sampai melarang orang lain menjalankan shalat yang merupakan amal yang paling utama.

Allah SWT berfirman yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-Nisa (4) : 58).⁴⁷

A. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain :

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), h.87

1. Penelitian yang dilakukan Maria Irene Hutabarat yang berjudul “Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Ekspor Terhadap Kinerja Industri Kelapa Sawit”. Menjelaskan bahwa Pajak ekspor dan harga CPO tahun sebelumnya berpengaruh nyata terhadap harga CPO pada tingkat kepercayaan 90 persen (pajak ekspor) dan 95 persen (harga CPO tahun sebelumnya). Pajak ekspor yang meningkat akan diikuti dengan meningkatnya harga CPO. Sedangkan ekspor CPO tidak berpengaruh nyata baik pada tingkat kepercayaan 90 persen maupun 95 persen. Jika CPO menurun, maka harga ekspor pun akan menurun. dan jika CPO meningkat maka ekspor CPO pun meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Maria Irene Hutabarat menyimpulkan bahwa untuk membayar pajak ekspor mengikuti harga meningkatnya juga CPO (Kelapa Sawit). untuk memastikan pajak ekspor itu bisa naik atau tidak sesuai dengan harga kelapa sawit tersebut dan dengan patokan harga untuk menghitung pajak ekspor tersebut, baik dalam perhitungan kenaikan setiap bulan atau setiap tahun kenaikan kelapa sawit, pajak ekspor tidak bisa memberi kebijakan karena pajak mengikuti harga barang yang ingin dikirim tersebut.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Marina Irene Hutabarat adalah, pajak ekspor yang dikenakan barang kelapa sawit tersebut yang akan dikirimkan ke luar negeri, dan pastinya mengirimkannya melalui kapal laut. Dan adapun perbedaannya adalah



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2010

Imam Muhamad Mutawaly Sya'rawi, *Min Washaya Al-Qur'an Al-Karim*, al-Taufiqia Bookshop, Cairo-Egypt, Tt,

Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan 2006

Subhi Ab.Rauf Ashr, *Mu'jam Maudu'i li Ayat al-Qur'an*, Darul Fadhilah , Cairo, tth,

B. Al-Hadist

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah

Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad

Hadits riwayat Imam, Ahmad

C. Hukum Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005

Undang-Undang No.7 Tahun 1991 Tentang Pajak Penghasilan

D. Buku-Buku

Abdurahman, Yahya. <http://Haytulislam.net>, diakses 27 mei 2012.

Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat dan Wakaf*, Bandar Lampung: Permata, 2018.

Abror, Khoirul. *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2018.

Ali Purwito, Indrian. *Ekspor Impor*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.

Andi, *perpajakan*, yogyakarta CV. Andi Offset, 2011.

- Anwar, Chairil. *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2016.
- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama mandiri, 2018.
- Barata, Atep Adya, Jajat Djuhadiat, *Tata Cara Pelunasan Bea Materai*, Jakarta: PT. Elex Media: 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2010
- Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Harjo, Dwikora. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Iqbal. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, Jakarta: Sketsa, 2009.
- Jafar, Surono. *Pajak Ekspor*, Jakarta: Mitra Wacana Media ,2013.
- Judisseno, Rimsky. K. *Perpajakan Jakarta* : Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Kartini, E. *Hukum Maritim*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Kamus besar bahasa indonesia*, Surabaya: amalia, 2005.
- Khazanah, *Buku pintar Islam*, Jakarta: PT. Kencana, 2010.
- Mardiasmo, *Perpajakan*,yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Muhammad Syah, Ismail. *Filsafat Hukum Islam*, Cet Ketiga, Jakarta: Bumi Askara,1999.
- Muljono, Djoko. *Panduan Bravet Pajak Penghasilan*, Jakarta: CV. Andi Offset: 2010.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Pajak dalam Islam.”(on-line) tersedia di: <https://muslim.or.id> (5 juni 2011).

Pradja, Juhaya. *Ekonomi Syariah*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2012.

Safri Nurmantu, *pengantar perpajakan*, Jakarata: PT. Granit, 2005.

Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 1998.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Supena, Ilyas. *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Susilo, Andi. *Buku Pintar Dunia Ekspor*, Semarang: CV, Oxy Consultant, 2018.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011.

Yani, Ahmad. *Solusi Masalah Perpajakan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Yustinus Prastowo, Agus Priyahna, Yusep Nugraha, *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha dan Peristiwa Khusus*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup: 2011.

Tahir, Masnun. ”Integrasi zakat dan pajak di indonesia dalam tinjauan hukum Positif dan hukum Islam” *jurnal Al-‘Adalah*, Vol.10 No.1,3 juni 2015.